

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sebelumnya

Dwitaya Aribawa (2016) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kinerja dan Keberlangsungan UMKM di Jawa Tengah”. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja dan keberlangsungan UMKM di Jawa Tengah. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dan pengambilan sampel dalam penelitian berasal dari empat kota yaitu Yogyakarta, Magelang, Surakarta, dan Semarang. Berdasarkan hasil analisis *bootstrapping* dari *Smart PLS*, hasilnya menunjukkan adanya pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja dan keberlangsungan usaha UMKM kreatif di Jawa Tengah, dan dengan adanya literasi keuangan yang baik diharapkan UMKM mampu membuat keputusan manajemen dan keuangan yang bijak. Hal ini memiliki implikasi bahwa dengan literasi keuangan yang baik diharapkan UMKM akan mampu membuat keputusan manajemen dan keuangan yang tepat untuk peningkatan kinerja dan berkelanjutan usaha.

Jacqueline Siekei, Juma Wagoki, Aquillars Kallo, Jomo Kenyata, (2013) melakukan penelitian tentang “*An assement of the role of financial literacy on perfomance of small and micro enterprises. Case of Equity Group Foundation Training Program on SMES in Njoro distrctit, Kenya*”. Penelitian ini bertujuan untuk menilai pengetahuan keuangan terhadap kinerja usaha kecil dan makro, dan untuk efek dari keterampilan manajemen kredit pada kinerja UKM, dan untuk

menemukan keterampilan penganggaran mempengaruhi kinerja UKM. Sampel yang digunakan 82, metode pengambilan sampel menggunakan teknik *Stratified Random Sampling* dan pengambilan sampel di kabupaten Njoro. Hasil t-test menunjukkan adanya pengaruh signifikan literasi keuangan terhadap kinerja UKM.

Samuel Adamoko dan Albert Danso (2014) melakukan penelitian tentang “*Financial Litreacy and Firm Performance: The moderating role of financial capital availability and resource flexibility*”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja perusahaan. Metode penelitian menggunakan metode berbasis survei dan regresi linier berganda dengan metode Least Square. Sampel menggunakan 298 perusahaan kewirausahaan di Afrika. Hasil dari temuan penelitian ini bahwa literasi keuangan yang baik dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Peningkatan kinerja perusahaan tersecemin ketika sumber daya yang fleksibel dan pengusaha dapat mengakses keuanagn dengan mudah.

Fatoki (2014) melakukan penelitian tentang “*The Financial Literacy of Micro Entrepreneurs in South Africa*”. Menggunakan 3 variabel literasi keuangan, perencanaan keuanagan, kontrol dan analisis, dan pembukuan UMKM. Metode penelitian menggunakan statistik deskriptif dengan data primer penyebaran kuisisioner dengan teknik *snowball sampling* . Sampel yang digunakan seluruh UKM di Afrika Selatan. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan masih banyak UMKM di Afrika Selatan yang memiliki tingkat literasi keuangan yang masih rendah. Tingkat literasi keuangan yang rendah akan mempengaruhi kinerja perusahaan di masa depan.

Anthony Abiodun Eniola dan Harry Entebeng (2015) melakukan penelitian tentang *“Financial literacy and SME firm Performance”*. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja UKM di Nigeria. Dengan sampel seluruh UKM di Nigeria dengan. Metode penelitian menggunakan statistik deskriptif dan teknik *sampling random*. Dalam penelitian literasi keuangan terdapat beberapa aspek yaitu pengetahuan keuangan, perilaku dan kesadaran. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan yang baik akan berdampak baik pula pada kinerja UMKM. Hal ini dibuktikan dengan UMKM yang memiliki tingkat literasi keuangan tinggi maka akan berdampak pada kesehatan posisi keuangan UMKM.

Pearl Dahmen dan Rodriguez Eillen (2014), melakukan penelitian tentang *“Financial and Small and Medium Sized Enterprise Development, Finance and Development Research Progamme Working Series”*. Tujuan penelitian ini adalah untuk pentingnya literasi keuangan terhadap kinerja. Analisis yang digunakan statistik deskriptif. Pengambilan sampel di Florida usaha kecil. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adanya hubungan yang kuat antara literasi keuangan UMKM dan keputusan pemilik perusahaan dalam membuat laporan keuangan.

Tom Ongesa et al (2014) melakukan penelitian tentang *“An Aessment Financial Literacy On Loan Rapayment by Small and Medium Entrepreneurs in Ngara, Nairobi Country*. Tujuan spesifiknya untuk membangun dampak keterampilan pembukuan, manajemen kredit dan keterampilan penganggaran mempengaruhi pinjaman oleh penerima manfaat. Penelitian ini dilakukan diantara

penerima manfaat dari Equity Group Foundation Training Program (EGFTP) tentang UKM di Ngara, Nairobi Country. Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif. Variabel penelitian ini adalah literasi keuangan, pembukuan, manajemen kredit, dan anggaran. Hasil penelitian ini menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara literasi keuangan dengan tingkat pengembalian kredit. Dengan data pada tingkat manajemen kredit *Unstandardized Coefficients* 0.642 dan pada tingkat signifikansi 5% dan tingkat kepercayaan 95%, maka antara literasi keuangan dengan tingkat pengembalian kredit.

Sean Wise (2013) melakukan penelitian tentang "*The Impact of Financial Literacy on New Venture Survival*". Dalam penelitian ini mempunyai beberapa variabel yang meliputi literasi keuangan UMKM, laporan keuangan, rasio keuangan UMKM, dan tingkat pengembalian pinjaman. Kemudian variabel tersebut diolah dengan metode persamaan model struktural dengan analisis deskriptif statistik. Hasil dari penelitian bahwa semakin tinggi tingkat literasi keuangan yang dimiliki maka semakin baik sistem laporan keuangan UMKM. Literasi pengusaha muda akan meningkatkan untuk kemungkinan pembayaran pinjaman antara usaha baru karena pelaku UMKM semakin cerdas dalam mengambil keputusan.

Harrison Kinyua Mutegi, Phalista W.Njeru dan Nyamboga Tom Ognesa (2015) melakukan penelitian tentang "*Financial Literacy And Its Impact On Loan Repayment By Small And Medium Enterpreneuers*". Tujuan penelitian untuk menentukan dampak dari program pelatihan literasi EGF (*Equity Group Foundation*) mengenai pinjaman UMKM dan untuk menetapkan sejauh mana

pembukuan, manajemen kredit, dan penganggaran. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif statistik, dan dimana data primer yang diperoleh adalah kuisisioner. Metode menggunakan teknik sampling acak stratifikasi, hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara literasi keuangan terhadap kinerja UMKM dalam hal pengembalian pinjaman atau kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan yang ditunjukkan nilai R Square = 0.887 yang berarti = 8.87% sedangkan sisanya 12.2%.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Metode	Substansi	Variabel	Perbedaan
1	Dwitaya Aribawa, 2016	Model persamaan struktural berbasis PLS (<i>partial least square</i>)	Kinerja UMKM, Keberlangsungan UMKM	- Literasi keuangan	Tingkat pengembalian kredit
2	Pearl Dahmen, Eillen Rodriguez, (2014)	Analisis statistik deskriptif, regresi linier berganda	Kinerja	- Literasi keuangan - Laporan keuangan - Rasio keuangan - Indeks keuangan	Tingkat pengembalian kredit
3	Jacqueline Siekei, Juma Wagoki, Aqullars Kallo, Jomo Kenyata, (2013)	Analisis statistik deskriptif, regresi linier berganda	Kinerja UKM	- Literasi keuangan - Manajemen kredit - Pembukuan - Anggaran	Tingkat pengembalian kredit
4	Olawale Fatoki (2014)	Analisis statistik deskriptif, regresi linier berganda	Literasi keuangan	- Perencanaan keuangan - Kontrol analisis dan - Pembukuan	Tingkat pengembalian kredit Kinerja UMKM

5	Tom Ongesa Oyamboga, Benson Omwario, Abdi Moulid, Dr.felistus, Prof. Gongera Enock, (2014)	Analisis statistik deskriptif, regresi linier berganda	Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - Keterampilan menyimpan buku (pembukuan) - Keterampilan penganggaran - Keterampilan Manajemen kredit 	Tingkat pengembalian kredit
6	Sean Wise, 2013	Persamaan model struktural	Pengembalian pinjaman	<ul style="list-style-type: none"> - Rasio keuangan - Laporan keuangan - Literasi keuangan 	Literasi keuangan Kinerja UMKM
7	Harrison Kinyua Mutegi, Phelista W.Njeru dan Nyamboga Tom Ognesa (2015)	Analisis statistik deskriptif, regresi linier berganda	Pinjaman Pembayaran	<ul style="list-style-type: none"> - Literasi keuangan - Pembukuan - Manajemen kredit - Anggaran UMKM 	Tingkat pengembalian kredit
8	Samuel Adomoko dan Albert Danso (2014)	Regresi linier berganda dengan metode PLS	Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - Literasi keuangan 	Tingkat pengembalian kredit

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Kinerja UMKM

Pada penelitian literasi terdahulu dalam pengukuran terhadap kinerja UMKM belum ada kesepakatan dan umumnya pada penelitian terdahulu hanya tertuju tau fokus dimana informasi itu diperoleh. Dan secara umum, data dalam pengukuran kinerja UMKM masih obyektif jarang ditemukan, maka dari itu untuk mengukur kinerja dari UMKM menggunakan pengukuran secara subyektif yang didasarkan

pada persepsi UMKM. Pengukuran subyektif dihubungkan dengan masalah-masalah yang lebih personal, yakni keberhasilan usaha dari prespektif pemilik bisnis kecil (Roijonen 2008) dalam jurnal Endang Sri Anyani (2013).

Selanjutnya, Ali (2003), mengemukakan dalam pengukuran kinerja UMKM dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan yang didasarkan pada tiga asumsi yang pertama, pengukuran kinerja sulit dilakukan secara kuantitatif, dikarenakan terbatasnya sumber daya (pemahaman keuangan dan tenaga kerja). Kedua, pengukuran kinerja pada umumnya melihat indikator keuangan yang lengkap, sehingga hal tersebut tidak bisa dijadikan acuan untuk mengetahui kondisi bisnis. Ketiga, pengukuran kinerja hanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang besar dan mempunyai sumber daya baik. Jadi kendala-kendala yang akan terjadi, pada penelitian pengukuran kinerja UMKM tidak mendasarkan pada pengukuran keuangan. Akan tetapi dengan pengukuran lebih simple dan mudah bagi peneliti mengukur kinerja melalui persepsi atau subyektif yang diharapkan mampu melihat kondisi yang sebenarnya di UMKM.

Peneliti memilih informasi data kinerja subyektif yakni diharapkan mampu melihat kondisi yang sebenarnya di UMKM dengan pengukuran lebih mudah dan simple untuk mengukur kinerja, karena lebih mudah didapat dibandingkan laporan keuangan. Data keuangan UMKM sering tidak ada atau tidak lengkap dilaporkan, jika adapun sulit untuk diinterpretasikan karena tujuan pembuatan laporan keuangan berbeda dengan umumnya. Pengukuran kinerja pada umumnya melihat indikator keuangan yang lengkap, sehingga hal tersebut tidak bisa dijadikan acuan untuk mengetahui keadaan bisnis. Sehingga pengukuran kinerja

yang kerap dipakai relatif dan hanya sesuai bila digunakan untuk perusahaan besar yang terstruktur dalam manajemen perusahaan, yang artinya hanya digunakan oleh perusahaan yang besar dan mempunyai sumber daya manusia yang baik.

Balanced Scorecard dimanfaatkan secara terbatas untuk memperbaiki sistem pengukuran kinerja eksekutif, *Balanced Scorecard* dimanfaatkan sebagai inti sistem manajemen strategis pada tahap ini *Balanced Scorecard* meningkatkan secara signifikan kualitas perencanaan yang bersifat strategis.. *Balanced Scorecard* juga untuk sistem pengelolaan kinerja personel (tidak hanya eksekutif, namun mencakup kinerja seluruh personel organisasi). Pengintegrasian sistem manajemen strategis berbasis *Balanced Scorecard* dengan sistem pengelolaan kinerja personel yang menghasilkan (Mulyadi. 2007;12)

Norton. D. P. dan Kaplan, R. S. (1992) yang diterjemahkan oleh Gasperz (2005;38) menyatakan, adanya empat prespektif penting dalam *Balanced Scorecard* agar dapat menerapkan konsep *Balanced Scorecard* yaitu:

1. Prespektif Finansial

Tujuan dan prespektif berperan sebagai fokus dan tujuan strategis, dari ukuran-ukuran prespektif *Balanced Scorecard*. Ukuran-ukuran yang dipilih menjadi bagian dari hubungan sebab akibat yang memuncak di peningkatan kinerja finansial. Dengan dua indikator yaitu meningkatkan pendapatan dan berkurangnya biaya.

2. Prespektif Pelanggan

UMKM harus bisa mengidentifikasi pelanggan serta segmen pasar, yang didasari oleh kondisi geografis, aktivitas konsumen, dan karakteristik

konsumen. Prespektif pelanggan memiliki dua indikator, yaitu kesetiaan customer dan keeratan hubungan dengan customer.

3. Prespektif Bisnis Internal

Ada beberapa kriteria untuk prespektif ini untuk kriteria nilai dari proses bisnis internal yakni proses inovasi, proses operasi, dan proses pelayanan purnal jurnal. Dengan dua indikator *cost effektivitas* dan produktivitas.

4. Prespektif Pertumbuhan

Dalam prespektif ini bertujuan untuk mengembangkan tujuan dan ukuran-ukuran yang mengendalikan pembelajaran serta pertumbuhan organisasi. Terdapat beberapa kategori utama dalam prespektif ini, yaitu kompetensi karyawan, infrastruktur teknologi, budaya perusahaan dan kinerja tim.

Dalam sektor UMKM diharapkan mampu meningkatkan perannya yang terkait dengan kinerja usaha. Kinerja sektor UMKM di penagaruhi faktor eksternal dan faktor internal (Mc Commick, 1997)

1. Faktor internal

- a. Sumber daya manusia (SDM), pemilik UMKM. Tenaga kerja, intellectual capital (IC), spriritual leadership, gaya kepemimpinan pemilik UMKM.
- b. Sumber daya alam (SDA), keunggulan yang dimiliki sebagai sumber usaha UMKM, kearifan atau kebijakan local.
- c. Sumber dana (financial) pembiayaan, modal atau dana pinjaman (kredit).
- d. Produk, kualitas yang dihasilkan, dan motivasi produk.
- e. Pemasaran, strategi pemasaran yang dilakukan.
- f. Fasilitas yang dimiliki.

- g. Lokasi / tempat berdirinya UMKM tersebut.
 - h. Size / ukuran UMKM.
 - i. Distribusi dan strategi pemasaran.
 - j. Tingkat keuntungan profit.
 - k. Personal cost.
2. Faktor eksternal
- a. Teknologi.
 - b. Informasi.
 - c. Pasar / pemasaran global.
 - d. Pemerintah melalui kebijakan ekonomi yang dibuat.
 - e. Pelanggan / konsumen.
 - f. Pesaing.
 - g. Supplier / pemasok.
 - h. Kondisi sosial, ekonomi dan budaya.
 - i. Peran lembaga yang lain.

2.2.2 Literasi Keuangan

Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan (2013) menyatakan bahwa secara definisi literasi diartikan sebagai kemampuan memahami, jadi literasi keuangan adalah kemampuan mengelola dana yang dimiliki agar berkembang dan hidup lebih sejahtera dimasa yang akan datang. OJK menyatakan bahwa misi penting dari program literasi keuangan yakni guna melakukan edukasi atau pendidikan dibidang keuangan kepada masyarakat Indonesia agar dapat mengelola keuangan secara cerdas, masyarakat tidak mudah tertipu pada produk-produk investasi dengan

tawaran yang menguntungkan tinggi dalam jangka pendek tanpa ada pertimbangan risikonya.

Menurut Remund (2010), literasi keuangan adalah pengetahuan atau wawasan segala dasar tentang keuangan, mampu memahami konsep-konsep keuangan, dan memanfaatkan pengetahuan keuangan sebagai pengambilan keputusan baik perseorangan maupun individu dan perusahaan. Selanjutnya, berdasarkan OECD (2013), literasi keuangan merupakan faktor yang cukup dominan dalam pertumbuhan ekonomi dan stabilitas suatu negara. Literasi keuangan yang baik dan bisa memanfaatkan terjadinya keputusan ekonomi terhadap isu ekonomi yang berkembang dan keuangan sedang muncul.

2.2.2.1 Tujuan dan Manfaat Literasi Keuangan

Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan (2013), literasi keuangan memiliki beberapa tujuan jangka panjang bagi seluruh masyarakat baik secara perseorangan maupun perusahaan. Kemudian tujuan pertama dari adanya literasi keuangan ini adalah meningkatkan literasi keuangan masyarakat dari sebelumnya yang tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan (Not Literate, 0,41%), menjadi (Well Literate, 21,84%) atau memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. Kedua, literasi keuangan meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan hal ini dikarenakan masih rendahnya tingkat literasi masyarakat di Indonesia.

Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan, Agus Sugianto menyatakan tujuan dari adanya literasi keuangan ini supaya masyarakat dan para pelaku industri jasa keuangan mengetahui kewajiban apa saja yang harus dilakukan.

2.2.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Literasi Keuangan

Menurut Huston (2011) dalam penelitian Sri Lestari (2015) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi literasi keuangan yaitu :

1. Pengelolaan keuangan
2. Pengetahuan investasi
3. Perencanaan keuangan untuk menentukan tingkat keterampilan pengelolaan keuangan dalam hal anggaran, tabungan, dan tanggung jawab atas penggunaan kredit.

2.2.2.3 Literasi Keuangan dan Pengembalian Kredit UMKM

Literasi keuangan yang baik akan berpengaruh terhadap tingkat pengembalian pinjaman dari UMKM kepada lembaga keuangan. Siekei, et al (2013) perusahaan yang mempunyai tingkat literasi baik akan meningkatkan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan bisnis dan meningkatkan kemampuan mereka dalam hal pencatatan untuk setiap transaksi dan mampu meletakkan pos-pos keuangan dengan baik. Kemampuan UMKM untuk mengelola modal yang didapatkan bisa berkontribusi terhadap tingkat pengembalian kredit UMKM dari sumber modal dan kinerja UMKM tersebut.

Penelitian oleh Ongesa et al (2014) bahwa tingkat literasi keuangan pada UMKM berpengaruh signifikan pada kemampuan membayar pinjaman mereka.

Hal ini juga senada dengan Mutegi, Njeru and Ongesa (2015) mengemukakan semakin tinggi literasi keuangan yang dimiliki maka semakin rendah presentase kredit macet dari perusahaan atau UMKM. Untuk pelaku yang menggeluti pada dunia usaha memiliki tingkat literasi keuangan yang baik dapat mengevaluasi dan membandingkan produk-produk keuangan, seperti rekening bank, kredit dan pilihan jaminan, produk tabungan, investasi dan asuransi sehingga mampu.

2.2.2.4 Literasi Keuangan dan Kinerja UMKM

Muraga & John (2015) dalam perusahaan literasi keuangan yang baik tentunya akan mampu untuk memanfaatkan pengetahuan di bidang keuangan dalam pengambilan berbagai keputusan yang tepat dalam meningkatkan usahanya. Selanjutnya, menurut Lusardi & Michelle (2007) pengetahuan yang baik mempengaruhi kondisi dan kinerja bisnis perusahaan yang berimplikasi pada pembuatan keputusan bagi perusahaan.

Lusardi dan Bassa Schresberg (2013), mengemukakan bahwa keuangan mempunyai hubungan positif terhadap kinerja usaha perusahaan. Hal ini ditunjukkan dengan perusahaan yang memiliki tingkat literasi tinggi cenderung memiliki kinerja yang baik. Pendapat ini sejalan dengan penelitian (Huston, 2010), bahwa apabila perusahaan memiliki tingkat keuangan yang tinggi maka akan berdampak pula terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja dari perusahaan tersebut.

2.2.3 Tingkat Pengembalian Kredit

2.2.3.1 Definisi Tingkat Pengembalian

Menurut Ardiyos (2001;233) tingkat pengembalian adalah hasil yang diperoleh dari penanaman modal tertentu di dalam suatu perusahaan di dalam periode tertentu. Sedangkan menurut Tandelilin (2001;48) tingkat pengembalian adalah hasil yang diperoleh dari aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi dengan perubahan harga. Kesimpulannya bahwa tingkat pengembalian merupakan suatu hasil yang diperoleh dengan menanamkan modalnya untuk jangka waktu yang tertentu dan sejumlah profit dimasa yang akan datang.

2.2.3.2 Definisi Kredit

Berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang diwajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.

Menurut Rivai (2013), kredit menurut bahasa atau istilah berasal dari bahasa lain, *credo* yang berarti *i believe*. *I trust*, yang berarti saya percaya atau dengan kata lain saya manaruh kepercayaan. Kasmir (2011) disisi lain kata kredit berasal dari bahasa Yunani yang berarti *credere* yang mempunyai arti kepercayaan atau dalam bahasa latin *creditum* yang berarti kepercayaan akan kebenaran.

Dapat disimpulkan bahwa kredit adalah suatu kegiatan usaha memberikan bantuan permodalan atau keuangan yang berbentuk barang, jasa dan keuangan yang dari kreditur (pemberi dana) kepada debitur (penerima dana) dengan

dasar kepercayaan yang diberikan oleh kreditur mampu mengembalikan kredit sejumlah nilai ekonomi yang telah diberikan oleh debitur pada waktu yang sudah ditentukan dengan balas jasa sesuai dengan perjanjian yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak.

2.2.3.3 Unsur-unsur Kredit

Menurut Kasmir (2012), dalam pemberian kredit harus memperhatikan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Suatu keyakinan yang dimiliki kreditur bahwa kredit yang diberikan (uag, jasa atau barang) suatu saat akan dikembalikan oleh pihak debitur dimasa yang akan datang seperti waktu yang telah disepakati. Kepercayaan ini didasari oleh penyelidikan dalam hal dilakukan oleh pihak nasabah yang akan memohon kredit.

2. Kesepakatan

Dalam proses pemberian kredit harus ada kesepakatan antara kreditur dan debitur yang dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani kewajiban dan haknya masing-masing.

3. Jangka Waktu

Masa pengembalian kredit yang telah disepakati bersama. Jangka waktu tersebut dapat jangka waktu yang pendek, menengah ataupun jangka panjang.

4. Risiko

Jangka waktu pengembalian pinjaman sangat berpengaruh pada risiko kredit. Semakin panjang jangka waktu suatu kredit maka semakin besar pula

risikonya, demikian sebaliknya. Risiko kredit ini biasanya di tanggung oleh kreditur atau pihak bank, baik risiko yang dilakukan secara sengaja oleh kesalahan nasabah, maupun risiko yang tidak disengaja oleh nasabah.

5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian kredit atau pembiayaan yang dikenal dengan bunga untuk bank konvensional. Kemudian untuk bank yang menganut prinsip syariah disebut bagi hasil.

2.2.3.4 Fungsi dan Tujuan Kredit

Kredit mempunyai peranan sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi kredit menurut Kasmir (2012) di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan sebagai berikut:

1. Meningkatkan utility (daya guna) dari modal atau utang.

Kredit sangat bermanfaat untuk meningkatkan daya guna uang. Artinya apabila uang hanya disimpan maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Kredit berguna untuk mendayakan uang membeli barang atau jasa.

2. Meningkatkan utility (daya guna) suatu barang.

Kredit bisa digunakan pihak debitur untuk membeli barang kemudian diolah menjadi barang yang lebih berguna dan bermanfaat.

3. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Dalam hal ini uang yang disalurkan oleh pihak kreditur akan beredar ke semua wilayah sehingga daerah yang kekurangan uang akan memperoleh uang tambahan dari daerah lain.

4. Meningkatkan peredaran barang.

Bagi si penerima kredit akan meningkatkan gairah bisnis dikarenakan mendapatkan suntikan modal yang baru.

5. Alat stabilitas ekonomi.

Stabilitas ekonomi bisa dipengaruhi oleh kredit yang diberikan bank akan menambah jumlah barang yang diperlukan masyarakat. Kredit juga bisa membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

6. Jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.

Banyaknya kredit yang disalurkan akan meningkatkan pendapatan. Apabila kredit digunakan untuk mengembangkan sebuah usaha maka perusahaan itu akan membutuhkan karyawan lebih untuk proses produksi sehingga dapat pula mengurangi pengangguran. Masyarakat disekitar perusahaan pun akan meningkatkan pendapatan dengan usaha disamping perusahaan.

7. Sebagai alat meningkatkan hubungan ekonomi internasional.

Dalam hal pinjaman Internasional akan meningkatkan saling membutuhkan antara debitur dan kreditur.

Sedangkan tujuan kredit menurut Kasmir (2012) sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan.

Hasil yang diperoleh pihak yang memberikan pinjaman (kreditur) adalah bunga sebagai balas jasa dan biaya administratif kredit yang dibebankan di nasabah. Di sisi lain keuntungan yang diperoleh debitur adalah bisa mengembangkan bisnis yang mereka jalani.

2. **Membantu Usaha Nasabah.**

Membantu untuk nasabah-nasabah yang sedang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Diharapkan setelah memperoleh dana, pihak debitur bisa mengembangkan usaha yang dijalani.

3. **Membantu Pemerintah**

Untuk pemerintah apabila semakin banyak kredit yang diberikan oleh pihak perbankan, akan mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik. Hal ini dikarenakan jika banyak kredit yang tersalurkan maka akan ada peningkatan ekonomi terutama di sektor rill.

2.2.3.5 Penyaluran Kredit

Menurut Ismail (2010;26), penyaluran kredit adalah kegiatan penyaluran dana dari kreditur (bank) kepada debitur (nasabah). Nasabah diwajibkan melunasi pinjaman dan membayar bunga atau imbal hasil sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank dalam mengalokasikan dana yang mereka miliki. Di setiap bank dana yang dialokasikan untuk penyaluran kredit mencapai 70%-80% dari volume usaha. Oleh karena itu bisa disimpulkan pendapatan terbesar pihak bank berasal dari penyaluran kredit dan pembayaran bunga yang dibayar oleh nasabah.

Besarnya dana yang dialokasikan oleh bank untuk penyaluran kredit menjadikan pegawai bank khususnya account officier harus memberikan perhatian lebih dalam analisis kredit agar tidak terjadi gagal risiko bayar (risk of default).

Risiko gagal bayar bisa dikarenakan kegagalan usaha atau ketidakmampuan bayar atau ketidaktersediaan membayar yang menyebabkan kredit bermasalah. Pada kasus kredit bermasalah, terdapat kemungkinan kreditur terpaksa melakukan tindakan hukum agar kasus tersebut terselesaikan. Apabila tindakan hukum tidak dilakukan oleh kreditur maka kreditur harus menderita kerugian yang jauh lebih besar dari perkiraan.

2.2.3.6 Analisis Kredit

Menurut Rivai (2013) analisis kredit merupakan kegiatan yang dilakukan oleh account officer terhadap kelayakan nasabah dalam penyaluran kredit, kelayakan usaha nasabah, kebutuhan kredit, kemampuan menghasilkan laba, sumber pelunasan kredit dan jaminan yang tersedia apabila terjadi gagal bayar.

Tujuan utama analisis kredit adalah mendapatkan informasi apakah nasabah layak menerima kredit dari pihak bank. Informasi kemampuan nasabah dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pada kreditur, baik pokok pinjaman maupun bunga yang harus dibayarkan. Hal tersebut dilakukan karena dalam pemberian kredit bank berpeluang besar menghadapi risiko gagal bayar dari penyaluran kredit tersebut. Tindakan yang harus di perhatikan dalam analisis kredit adalah kemauan dan kemampuan dari nasabah untuk memenuhi kewajibannya (Rivai, 2013).

Menurut Kasmir (2011), dalam menganalisis kredit penilaian terhadap kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Hal ini juga berlaku untuk ukuran-ukuran yang ditetapkan menjadi standar penilaian setiap bank. Pada umumnya kriterian penilaian yang wajib dan harus dilakukan oleh bank dalam menganalisis kredit harus memenuhi analisis 5C dan 7P. Dalam penilaian

berdasarkan 5C adalah meliputi Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition of Economy. Sedangkan 7p meliputi Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability dan Protection.

2.2.3.7 Kredit Bermasalah

Berdasarkan PSAK No.31 Tahun 2009, kredit bermasalah pada umumnya kredit yang pembayaran angsuran pokok dan bunganya telah melewati 90 hari lebih setelah jatuh tempo. Kredit bermasalah / Non-Performing terdiri dari atas kredit yang digolongkan sebagai kredit kurang lancar, diragukan dan macet.

Menurut Rivai (2013), kredit bermasalah terdiri dari beberapa pengertian, yaitu:

1. Debitur kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya dalam pembayaran pokok pinjaman maupun pembayaran bunga, denda keterlambatan dan lain sebagainya.
2. Kredit yang mengalami cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian sehingga terdapat tunggakan atau ada potensi kerugian pada usaha nasabah yang menyebabkan gagal bayar sesuai jatuh tempo.
3. Golongan kredit perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.

2.2.4 UMKM

Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjelaskan tentang pengertian dari masing-masing usaha tersebut. Berdasarkan UU No.20 tahun 2008 UMKM memiliki beberapa kriteria. Pertama,

usaha mikro yaitu usaha milik perorangan atau badan usaha milik orang dengan kekayaan bersih < 50 juta dan hasil penjualan < 300 juta. Kedua, usaha kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan perorangan atau badan dengan kriteria kekayaan bersih 50-500 juta rupiah dan hasil penjualan 300 juta sampai 2,5 miliar rupiah. Ketiga, usaha menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki dengan kriteria memiliki kekayaan bersih > 500 juta rupiah dan hasil penjualan 2,5 miliar rupiah – 50 miliar rupiah.

Usaha Mikro, berdasarkan Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana mestinya diatur dalam undang-undangan ini.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh seseorang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan

jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Selanjutnya, Sukirno (2004) Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan suatu yang bermodal awal kecil atau terbatas, dan jumlah karyawan sedikit, nilai modal dan jumlah karyawan sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh pemerintah. Menurut Rudjito (2003) usaha mikro adalah usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh penduduk miskin atau mendekati miskin. Usaha mikro sering disebut dengan usaha rumah tangga. Besarnya kredit yang dapat diterima oleh usaha adalah Rp 50 juta. Usaha mikro adalah usaha produktif secara individu atau tergabung dalam koperasi dengan hasil penjualan Rp 100 juta.

2.2.4.1 Tujuan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

Berdasarkan Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pasal 3 disebutkan bahwa usaha mikro bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan yang berkeadilan.

Bentuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ataupun perusahaan, perorangan, persekutuan, seperti halnya Firma dan CV maupun pereorangan terbatas. Dalam prespektif dunia telah diakui sangat vital dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara yang sedang berkembang (NSB), akan tetapi juga di negara-negara maju (NMJ). Di Negara maju UMKM begitu penting tidak hanya karena kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar, seperti di negara sedang berkembang tetapi juga banyak kontribusi terhadap pembentukan atau

pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) paling besar di bandingkan kontribusi dari usaha besar.

Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan upaya yang ditempuh untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Ada kriteria Usaha Mikro menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6, Usaha Mikro adalah yang produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta.

Adapun ciri-ciri dari Usaha Mikro antara lain:

1. Jenis barang usahanya tidak tetap, dapat berganti pada periode tertentu.
2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, dapat berubah sewaktu-waktu.
3. Belum melaksanakan administrasi keuangan yang sederhana dan tidak memisahkan antara keuangan keluarga dengan keuangan usaha. Sumber daya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa entrepreneur yang memadai.
4. Tingkat pendidikan rata-rata relatif rendah.
5. Pada umumnya belum akses ke perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank.
6. Umumnya tidak mempunyai izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2.5 Hubungan Antara Variabel (Literasi Keuangan, Tingkat Pengembalian Kredit Terhadap Kinerja)

2.5.1 Hubungan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja

Dahmen dan Rodriguez (2014) juga menyatakan bahwa pentingnya pemilik usaha memahami pengetahuan keuangan guna memiliki kinerja perusahaan yang lebih bagus. Sehingga memungkinkan UMKM mengalami pertumbuhan bisnis. Anggraeni (2015) literasi keuangan mempengaruhi cara berpikir seseorang terhadap kondisi keuangan serta mempengaruhi pengambilan keputusan yang strategis dalam hal keuangan dan pengelolaan yang lebih baik bagi pemilik usaha. Kemampuan mengelola keuangan pemilik usaha memang sangat diperlukan untuk kinerja usaha dan kelangsungan usahanya.

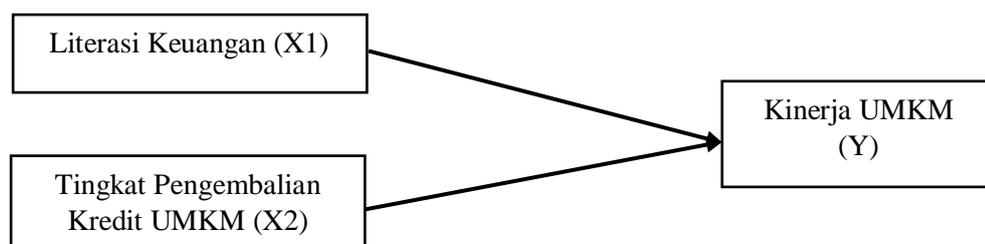
Menurut Eniola dan Entebeng (2014) menunjukkan bahwa literasi keuangan mempunyai literasi keuangan yang baik akan berdampak baik pula pada kinerja UMKM. Hal ini dibuktikan dengan UMKM yang memiliki tingkat literasi keuangan tinggi akan berdampak pada kesehatan posisi keuangan UMKM. Dalam penelitian Fatoki (2014) menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan yang masih rendah akan berpengaruh pada kinerja perusahaan. Dan menurut Adamoko dan Danso (2014) menunjukkan bahwa ada pengaruh pada literasi keuangan yang baik mampu meningkatkan kinerja perusahaan, dan peningkatan kinerja perusahaan dapat dilihat ketika sumber daya yang fleksibel dan pengusaha dapat mengakses keuangan dengan mudah.

2.5.2 Hubungan Tingkat Pengembalian Kredit Terhadap Kinerja

Selain berimplikasi pada kinerja perusahaan, tingkat literasi keuangan yang tinggi akan mampu berdampak pada tingkat pengembalian kredit yang diterima perusahaan dan kreditur-kreditur yang ada. Hal ini dikarenakan jika apabila tingkat literasi keuangan perusahaan yang tinggi maka akan lebih berhati-hati dalam pengelolaan sumber modal dengan waktu yang telah ditentukan sehingga perusahaan tidak akan mengalami gagal bayar. Mahmoeidin (2002) menjelaskan bahwa tingkat pengembalian kredit yang rendah (bermasalah) akan mengakibatkan debitur mengalami kerugian baik dari sisi finansial maupun reputasi, dari sisi finansial, debitur akan menanggung biaya lebih tinggi atas kredit yang bermasalah yakni berupa sanksi administratif atau bunga yang pada akhirnya akan semakin menggerus pendapatan debitur. Pada penelitian Ongesa (2014) dan Harisson (2015) menunjukkan bahwa pembukuan, manajemen kredit dan anggaran perusahaan sangat menentukan perusahaan dalam pengembalian kredit. Pada penelitian tersebut dijelaskan faktor literasi keuangan yang baik sangat berpengaruh pada ketiga indikator yang menentukan tingkat pengembalian perusahaan. Apabila tingkat literasi keuangan baik maka tingkat pengembalian pinjaman juga akan begitu sebaliknya.

2.6 Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan, dengan Literasi Keuangan (X1), Tingkat Pengembalian Kredit UMKM (X2) merupakan variabel bebas (*independent variabel*), sedangkan Kinerja UMKM (Y) merupakan variabel terikat (*dependent variabel*). Pada penelitian ini akan menguji atau mencari adanya pengaruh signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

2.7 Hipotesis

Dalam penelitian ini diajukan sebuah hipotesis sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan yang telah dikemukakan. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Literasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Gresik.
2. Tingkat pengembalian kredit berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kecamatan.